

Nama: Rizka Mufidah

NPM: 2313031001

1. Analisis Struktur Pengeluaran

Apakah struktur belanja sudah efisien?

Secara singkat: belum efisien. Dengan 68% anggaran terserap untuk gaji dan tunjangan guru, Nusantara Raya masuk kategori *input-heavy*, berat di sisi sumber daya manusia tetapi miskin pada investasi yang langsung berdampak ke kualitas pembelajaran. Ini diperparah oleh maldistribusi guru (kelebihan di kota, kekurangan di desa), yang berarti pengeluaran besar itu pun tidak merata manfaatnya.

Alokasi 12% untuk infrastruktur terlihat wajar di atas kertas, namun fakta bahwa infrastruktur digital sangat terbatas menunjukkan bahwa anggaran infrastruktur tidak diarahkan secara strategis. Sementara itu, 8% untuk bantuan siswa terlalu kecil untuk mengatasi ketimpangan kota-desa yang disebut "sangat tinggi."

Bagian yang perlu direalokasi:

- Porsi gaji perlu dipertahankan secara nominal, namun *mekanismenya* harus diubah dari flat salary menjadi sistem insentif berbasis penempatan dan kinerja, sehingga guru mau bertugas di daerah terpencil.
- Infrastruktur digital perlu mendapat sub-alokasi khusus dari pos infrastruktur (minimal 5–6% dari total APBD pendidikan), diprioritaskan untuk sekolah terpencil.
- Bantuan siswa perlu naik ke 12–15%, dengan formula berbasis kebutuhan (miskin + daerah terpinggir mendapat bobot lebih).
- Pos administrasi (12%) perlu diaudit dan dipangkas, lazimnya target efisiensi 3–5% bisa dibebaskan untuk reinvestasi ke program inti.

2. Analisis Sumber Pembiayaan

Terlalu bergantung pada pemerintah daerah?

Ya. Model saat ini sepenuhnya bergantung pada APBD, yang memiliki dua kelemahan: pertama, rentan terhadap fluktuasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan transfer pusat; kedua, tidak ada insentif bagi sektor lain untuk berkontribusi pada kualitas pendidikan lokal.

Model pembiayaan alternatif yang realistis:

- Public-Private Partnership (PPP) untuk infrastruktur digital. perusahaan teknologi dan telekomunikasi dapat diajak berinvestasi dalam konektivitas sekolah dengan skema tax incentive atau CSR terstruktur. Model ini sudah berjalan di beberapa daerah melalui program Bakti Kominfo.

- Dana Abadi Pendidikan Daerah, meniru model Dana Abadi Pendidikan nasional (LPDP), provinsi dapat membentuk endowment fund dari sebagian APBD + kontribusi BUMD, yang imbal hasilnya digunakan untuk beasiswa dan pelatihan guru.
- Skema *output-based financing* dari pusat, mendorong transfer dana DAK Pendidikan dikaitkan dengan capaian kinerja (skor literasi, angka partisipasi murni), bukan hanya penyerapan anggaran.
- Kontribusi orang tua berbasis kemampuan (*sliding scale*) untuk sekolah swasta-mitra, agar beban APBD untuk sekolah menengah atas dapat dirasionalisasi.

3. Perbandingan dengan Praktik Negara OECD

Elemen yang realistis diadopsi:

Praktik OECD	Adaptasi untuk Nusantara Raya
Penganggaran berbasis kinerja	Mulai dari indikator sederhana: skor literasi, kehadiran guru, rasio siswa-guru terpencil
Alokasi dana berbasis kebutuhan siswa	Formula BOS berbobot: siswa miskin + daerah 3T mendapat koefisien lebih tinggi
Peningkatan kualitas guru	Program guru penggerak + insentif finansial untuk penempatan terpencil
Evaluasi berbasis data	Sistem informasi manajemen pendidikan (DAPODIK) yang sudah ada tinggal dioptimalkan

Tantangan penerapan di konteks Indonesia:

- Kapasitas birokrasi: penganggaran berbasis kinerja membutuhkan aparatur yang terlatih menganalisis data saat ini banyak dinas pendidikan kabupaten/kota masih beroperasi secara administratif, bukan analitis.
- Politik guru: redistribusi guru ke daerah terpencil berbenturan dengan kepentingan serikat guru dan preferensi personal ASN perlu negosiasi panjang dan insentif nyata.
- Fragmentasi kewenangan: pendidikan dasar-menengah terbagi antara kabupaten/kota dan provinsi, sehingga reformasi provinsi bisa terhambat jika tidak ada koordinasi lintas level.
- Infrastruktur digital yang belum merata: model pembelajaran berbasis data asumsinya ada konektivitas internet di banyak desa hal ini masih jadi hambatan fisik.

4. Rancangan Reformasi 5 Tahun

Tahun 1–2: Fondasi

Prioritas pertama adalah membangun sistem data yang andal, integrasi DAPODIK, pemetaan distribusi guru per kecamatan, dan baseline skor literasi-numerasi per sekolah. Tanpa data yang bersih, reformasi berikutnya tidak bisa diarahkan dengan tepat.

Bersamaan dengan itu, mulai redistribusi guru secara bertahap dengan insentif finansial nyata untuk penempatan di daerah terpencil (kenaikan tunjangan 20–30%), dan identifikasi 200 sekolah prioritas untuk digitalisasi awal melalui kemitraan PPP.

Tahun 3–4: Implementasi

Terapkan struktur belanja baru, formula BOS berbobot kebutuhan mulai berlaku, pos administrasi dipangkas, dan pos pelatihan guru diaktifkan. Pilot penganggaran berbasis kinerja di 3–5 kabupaten/kota terpilih. Ekspansi digitalisasi ke 600–800 sekolah berikutnya. Program Guru Penggerak dijalankan di skala provinsi dengan kurikulum pelatihan berbasis hasil asesmen siswa.

Tahun 5: Konsolidasi

Seluruh sistem sudah berjalan: semua sekolah terjangkau konektivitas, redistribusi guru selesai, Dana Abadi Pendidikan Daerah aktif, dan penganggaran berbasis kinerja diterapkan penuh. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk mengukur apakah skor literasi sudah mendekati rata-rata nasional dan ketimpangan kota-desa berkurang signifikan.

Monitoring dan evaluasi berjalan melalui tiga lapis: dashboard provinsi yang memperbarui data kehadiran guru dan penyerapan anggaran secara bulanan; asesmen sampel literasi-numerasi setiap semester; dan audit independen tahunan yang hasilnya dipublikasikan secara terbuka. Hasil evaluasi harus memiliki konsekuensi nyata terhadap alokasi anggaran tahun berikutnya, bukan sekadar laporan yang disimpan di laci.